DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 2017. *Realisasi Pajak Daerah*, http://dppksby.com/Home/RealisasiPajakDaerah. Diakses tanggal04 April 2017

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2017. *Hasil Pencarian*. https://surabayakota.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=pendapatan+asli+daerah&yt1=Cari. Diakses tanggal 25 April 2017

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya. 2015. *Karakteristik Geografi*,http://pemerintahan.surabaya.go.id/#1441609360216-d883fed9-12ce. Diaskes tanggal 25 April 2017

Halim, A., I.R. Bawono, dan A. Dara. 2014. *Perpajakan*. Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Hartoyo, H. dan U. Supardi. 2010. *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB. Pengalaman di Pemerintah Pusat, Referensi untuk Implementasi Pajak Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.

Pajak Online Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 2016. *Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya*. http://pajakonline.surabaya.go.id/. Diakses tanggal 25 April 2017

Pemerintah Kota Surabaya. 2011. *Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 No. 4. Surabaya: Sekretaris Daerah Kota Surabaya

----------. 2010. *Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 No. 11. Surabaya: Sekretaris Daerah Kota Surabaya

----------. 2012. *Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 No. 36. Surabaya: Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*

Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

---------. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 130. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---------. 2000. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNo. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 130. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Supriyanto, H. 2010. *Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meterai*. Jakarta Barat: PT Indeks

LAMPIRAN